

KERJASAMA TRILATERAL DALAM MENANGANI ANCAMAN MARITIM DI PERAIRAN SULU

Mochammad Andrey Apriyana¹
Nim. 1202045206

Abstract

This study aims to determine trilateral cooperation in dealing with maritime threats in the Sulu Sea. And explain how the handling and prevention carried out by Indonesia, Malaysia and the Philippines to overcome the existence of maritime threats in the Sulu Sea. The type of research used is descriptive type. The results of the study show that the Trilateral Cooperation in handling maritime threats in the sea is by conducting joint patrols, making the Maritime Command Center. The deterrent was done by collaborating on intelligence information exchange agreements, conducting joint military exercises

Keywords: *Cooperation Trilateral , Piracy, Sulu Sea*

Pendahuluan

Laut Sulu adalah sebuah laut besar di bagian barat daya Filipina yang dipisahkan dari Laut China Selatan di barat laut oleh Palawan dan dari Laut Sulawesi di tenggara oleh kepulauan Sulu. Borneo ada di barat daya dan Visayas di timur laut. Laut Sulu memiliki sejumlah kepulauan yaitu Cuyo dan Cagayan de Sulu adalah bagian provinsi Palawan sedangkan Cagayan de Tawi-Tawi dan kepulauan Kura-kura merupakan bagian provinsi Tawi-Tawi, Basilan, Jolo.

Laut Sulu merupakan salah satu jalur SLOC (*Sea Line Of Communication*) dan SLOT (*Sea Line of Trade*). Laut Sulu mempunyai arti strategis bagi perdagangan beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sebagai jalur perairan ekonomi yang strategis, lebih dari 55 juta metric ton barang yang berisi ekspor mineral seperti batu bara dan lebih dari 18 juta orang melintasi perairan dari Indonesia ke Filipina tersebut per tahunnya. Hal ini menyebabkan laut Sulu rentan terhadap kejahatan transnasional seperti terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan narkoba.

Masalah kejahatan transnasional yang terjadi di Laut Sulu merupakan salah satu dari kelompok Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf muncul tahun 1989 sebagai pecahan dari *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dipelopori oleh Abdurajak Abubakar Janjalani yang melanjutkan perjuangan mendirikan negara berlandaskan Islam di Mindanao. Kelompok ini dipimpin Isnilon

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: christinpri@gmail.com

Totoni Hapilon menggunakan wilayah Jolo, Sulu, Tawi-tawi, Basilan, dan Mindanao sebagai basis perjuangan mereka.

Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan laut Sulu ini membuat negara Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan kerjasama untuk mengantisipasi terulang kembali adanya perompakan dan teroris terhadap kapal-kapal yang melewati jalur perairan Laut Sulu. Ketiga negara telah mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama soal keamanan di Laut Sulu dalam kesepakatan yang disebut *Trilateral Co-operative Arrangement* (TCA). Adapun kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut adalah melakukan *Joint working grup/patrol* maritim bersama (*joint maritime patrol*). Dalam kerjasama tersebut patroli maritim bersama tidak hanya di Laut Sulu namun di beberapa tempat yang berdekatan dengan laut Sulu hal ini dikarenakan adanya perompakan yang menyebar kebeberapa wilayah.

Kerjasama tersebut dilaksanakan karena Laut Sulu merupakan jalur perdagangan antara Indonesia dan Filipina. Namun dikarenakan adanya kejahatan transnasional tersebut pemerintah Indonesia melarang kapal Indonesia umumnya membawa batu bara melintas hal ini merugikan secara ekonomi. Devisa dari sektor batu bara yang terganggu. Ada potensi kerugian sebesar US\$ 10 juta (sekitar Rp 132 miliar) sebulan jika larangan ini berlangsung lama.

Indonesia mempunyai tiga jalur laut untuk kepentingan ekspor dan impor. Jalur pertama, juga disebut jalur barat, melewati Selat Karimata di barat Kalimantan, terus ke Laut China Selatan atau Selat Malaka. Jalur kedua, jalur tengah, melewati Selat Makassar di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi ke Laut Sulu dan terus ke Samudera Pasifik atau Laut China Selatan, dan jalur ketiga, atau jalur timur, melewati laut di antara Pulau Sulawesi dan Maluku ke Laut Sulu untuk terus ke Laut China Selatan atau Samudera Pasifik. Kebanyakan kapal cargo yang melewati Laut Sulu, membawa batubara dan komoditas ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Selain itu keterlibatan Malaysia dalam kerjasama ini karena posisi kejadian perompakan di sekitar perairan pulau Tawi-Tawi, Pulau Jolo dan Pulau Basilan sangat dekat dan berbatasan dengan perairan wilayah Malaysia.

Dengan adanya fenomena perompakan yang terjadi di Laut Sulu tersebut maka saya ingin meneliti bagaimana upaya kerjasama antara negara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam mengatasi perompak di laut Sulu tersebut dengan tujuan untuk mengamankan dan melancarkan hubungan perdagangan antar negara di sekitar wilayah laut Sulu.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Keamanan Maritim

Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek keamanan maritim dalam kebijakan nasional. Menurut Makmur Keliat, kendati dewasa ini masalah keamanan maritime sedang diperbincangkan banyak pihak, belum ada satupun pihak yang mencetuskan definisi utuh dari keamanan maritim karena masalah ini dinilai terlalu sensitif khususnya dalam hal batas laut suatu negara.

Menurut Timothy D. Hoyt, fokus kepedulian keamanan non-tradisional harus dialihkan dari negara menjadi kelompok atau individu dengan isu-isu yang bersifat non-militer seperti keamanan ekonomi, lingkungan, politik, termasuk keamanan maritim. Konsep keamanan maritim tampaknya berada di antara dua interaksi pemikiran yang berbeda, yaitu antara kelompok yang menggunakan kerangka tradisional tentang keamanan. Keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman, yaitu:

1. Tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (*terrorist acts against shipping and offshore installations*)
2. Pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*)
3. Lalu lintas obat terlarang dan zat-zat psikotropik (*illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*).

Konsep Transnational Crime

Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.

Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.

Menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000, kejahatan bisa disebut bersifat transnasional jika:

1. dilakukan di lebih dari satu negara,
2. persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain,
3. melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, dan berdampak serius pada negara lain.

Konsep Kerjasama

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.

Menurut Anthonius Sitepu juga mengklasifikasikan kerjasama ke dalam bidang yang dilakukan, yaitu:

1. Kerjasama universal (global) yang melibatkan semua pihak di dunia yang tergabung dalam suatu tujuan bersama atau yang dapat disimpulkan sebagai integrasi internasional;
2. Kerjasama regional yang dilakukan oleh Negara-negara yang berdekatan secara geografis, memiliki politik dan budaya yang relative sama namun struktur produktifitas dan kemampuan yang berbeda mendorong mereka untuk melakukan kerjasama;
3. Kerjasama fungsional untuk mendukung fungsi dan tujuan bersama. Kerjasama ini bertolak belakang dengan pemikiran pragmatis yang menunjukkan kemampuan tertentu pada masing-masing pihak yang terkait dalam kerjasamanya;
4. Kerjasama ideologis yang terjadi karena adanya kesamaan pandangan terhadap ideologi yang dianut dan hal ini mempengaruhi perilaku kerjasama yang dilakukan.

Dengan adanya perompakan yang terjadi perairan Laut Sulu maka negara Indonesia, Filipina, Malaysia melakukan kerjasama untuk mengamankan perairan tersebut. Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia adalah kerjasama fungsional untuk mendukung fungsi dan tujuan bersama. Kerjasama ini bertolak belakang dengan pemikiran pragmatis yang menunjukkan kemampuan tertentu pada masing-masing pihak yang terkait dalam kerjasamanya. Kerjasama ketiga negara tersebut dengan membentuk kerjasama trilateral dalam Joint working grup untuk mengamankan kawasan perairan laut Sulu tersebut.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kerjasama Trilateral dalam menangani ancaman maritime di Perairan Sulu. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini untuk mendukung penulis pada penelitian melalui buku-buku pustaka, file yang didownload di internet dan berupa dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berupa analisa isi kerjasama Trilateral dalam menangani ancaman maritime di Perairan Sulu. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serata mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang di download dari internet sebagai bahan referensi penelitian.

Hasil Penelitian

Laut Sulu merupakan wilayah ekonomi Asia Tenggara dengan negara Malaysia-Indonesia dan Filipina. Kawasan ini berfungsi sebagai penghubung perdagangan antara Cina dengan kepulauan rempah-rempah di Asia Tenggara. Kepulauan rempah-rempah menghasilkan pala dan bunga pala, cengkik, cendana (*sandalwood*), dan komoditi mewah lainnya seperti nuri dan burung-burung surga (*birdrs of Paradise*)

yang diperdagangkan melalui Laut Sulu ke China dan negara Thai di utara, serta Jawa dan Malaka di barat.

Laut Sulu merupakan Jalur perdagangan antar negara hal inilah yang akan dijadikan target dalam beberapa kejahatan transnasional. Kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Berikut adalah beberapa kejahatan transnasional yang terjadi di Laut Sulu seperti pembajakan/perompakan, terorisme.

Munculnya kejahatan transnasional yang terjadi di Laut Sulu memiliki beberapa faktor-faktor yaitu: pertama faktor geografis, Perairan Asia Tenggara merupakan struktur kelautan yang paling rumit di dunia. Hampir semua tipe topografis terdapat pada perairan ini seperti landas kontinen yang dangkal, laut dalam, lereng benua, palung dan pulau karang. Pulau ini mencapai 8.940.000 kilometer persegi, atau 2,5 persen dari lautan dunia, meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Philip, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Sulawesi, Laut Sulu dan Laut Pilipina. Dan secara umumnya Laut Sulu merupakan alur jalur perdagangan kapal-kapal untuk berlabu ke pelabuhan yang ada di Indonesia, Filipina dan Malaysia.

Kedua, faktor ekonomi yaitu Salah satu aktivitas jalur perdagangan di Laut Sulu di lakukan oleh antara negara Indonesia dan Filipina. Hal ini banyaknya aktivitas ekspor Impor Indonesia dan Filipina memiliki nilai kargo yang melintasi perairan tersebut mencapai US\$40 miliar atau setara Rp538,9 triliun (kurs Rp13.473 per dolar AS). Selain itu, pada perairan Sulu Filipina tersebut banyak sejumlah kapal barang yang berisi ekspor mineral seperti batu bara dari Indonesia yang nilainya mencapai US\$700-US\$800 juta atau setara Rp9,4-Rp10,7 triliun. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional tersebut para perompakan melakukan aksinya dengan menyandera awak kapal untuk dapat menegoisasi terhadap pemerintah. Jadi perompakan yang terjadi di perairan Laut Sulu pemicu utamanya adalah agar para perompakan dapat uang tebusan untuk membiayai aktivitas mereka. Ketiga, faktor social yaitu perompakan yang terjadi di Laut Sulu dikarenakan adanya perpecahan yang disebabkan adanya gerakan teroris yang lahir karena pemerintah Filipina. Hal ini pemerintah Filipina gagal mengatasi penyebab struktural dari konflik bersenjata di Filipina yang melibatkan kelompok Moro yang berakar pada kolonialisme.

Kejahatan transnasional yang terjadi di Perairan Sulu merupakan dari aktivitas gerakan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf adalah suatu gerakan atau kelompok yang bersifat radikal dimana dalam gerakan tersebut menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Gerakan Abu Sayyaf di Filipna ini telah meresahkan warga Filipina dengan aksi-aksi pengeboman, penculikan dan pengeksekusian terhadap sandera dan gerakan tersebut telah mengarah ke taraf terorisme.

Sebagian besar pemimpin Abu Sayyaf berasal dari Afghanistan yang berperang melawan Uni Soviet pada era 1980-an. Abu Sayyaf, yang berarti bapak ahli pedang dalam bahasa Arab, memiliki banyak anak buah dalam pertempuran tersebut. Abu

Sayyaf telah memiliki hubungan dengan sebuah gerakan fundamentalis Islam, Al-Islamic Tabligh. Kelompok ini dipimpin oleh Janjalani yang menjalankan sebuah pembentukan negara *Islamic Theoratic State of Mindanao* (MIS) dan memasukan sebuah kepercayaan agama yang meneriakkan intoleransi dengan tujuan untuk menyebarkan Islam melalui Jihad. Serangan ASG yang terbesar adalah serangan di kota Ipil di Mindanao pada bulan April 1995, dilanjutkan serangan pada April 2000 yang menewaskan 21 orang termasuk 10 turis barat di sebuah tempat wisata di Malaysia, pada May 2001 serangan ASG menewaskan 3 orang penduduk AS dan 17 orang Filipina di sebuah tempat wisata di Palawan, Filipina, termasuk beberapa wisatawan asing mengalami cedera.

Pada bulan Juni 2002 Abu Sayyaf melakukan aksi penculikan terhadap warga negara asing. Empat warganegara Indonesia menjadi korban penculikan dan penyanderaan mereka. Keempat orang asing ini adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal SM-88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu di Filipina Tengah. Penyergapan terhadap mereka dilakukan dilepas pantai Pulau Jolo dan keempatnya kemudian dibawa kedaratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu ABK Indonesia Ferdinand Joel berhasil diselamatkan. Kemudian pada bulan oktober 2002, ASG meledakkan bom di dekat markas militer Filipina di Zamboanga dan menewaskan seorang staf AS.

Berbagai aktivitas di atas tidak didasari motif politik yang jelas sehingga dikatakan bahwa ASG mengalami degenerasi dari organisasi teroris murni menjadi sekadar kelompok kriminal/bandit. Degenerasi ASG menjadi kumpulan kelompok bersenjata tanpa ideologi dan kepemimpinan yang jelas terjadi setelah Janjalani, tokoh pemimpin ideologis dan pendiri ASG, tewas dalam baku tembak dengan polisi Filippina di pulau Basilan. Meskipun demikian, mulai tahun 2003, ASG telah melakukan upaya mengembalikan organisasi tersebut ke tujuan semula, yaitu sebagai kekuatan Islam yang terintegrasi dan kredibel di bawah kepemimpinan Khadafy Janjalani, adik Abdurrazak Janjalani dan Abu Sulaiman. Upaya ini dilakukan dengan menangkapi dan membunuh para pemimpin faksi-faksi ASG yang kerap melakukan banditry.

Kembalinya ASG dari kelompok bandit menjadi organisasi teroris murni mengindikasikan bahwa organisasi ini memiliki basis ideologi yang kuat, yakni militansi Islam. Faktor kepemimpinan juga sangat berpengaruh dalam ASG sebagai konsekuensi logis dari ideologi sebagai *center of gravity*. Tanpa adanya pemimpin yang juga bertindak sebagai ideolog yang menyediakan basis perjuangan ASG, organisasi ini segera terpecah-belah dan mengalami degenerasi menjadi kelompok kriminal biasa yang tujuan akhirnya adalah uang dengan embel-embel perjuangan Islam. Meskipun saat ini Khadafy dan Abu Sulaiman telah tewas, mereka tetap menjadi pengarah strategi dan taktik ASG. Saat ini, ASG dikatakan telah mengurangi aktivitas penculikan demi tebusan dan kembali melakukan metode-metode penciptaan rasa takut di kalangan publik melalui beberapa modus yang telah dijabarkan di atas.

Untuk mengatasi kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Grup maka pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan kerjasama Trilateral.

Pertemuan tiga negara ini merupakan inisiatif dari Indonesia dengan tujuan membahas situasi keamanan maritim di kawasan tiga negara tersebut. Selain itu juga untuk memastikan agar kerja sama di bidang ekonomi tidak terganggu dengan adanya peningkatan keamanan. Kejadian perompakan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan pertemuan ini. Pertemuan Trilateral yang diadakan pada tanggal 5 Mei 2016 bertempat di Aula Gedung Agung, Yogyakarta dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata ketiga Negara yaitu : Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Malaysia: Menteri Luar Negeri Dato' Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Tan Sri Dato' Sri (DR) Jenderal Zulkifeli Mohd. Zin, Filipina : Menteri Luar Negeri Filipina, Jose Rene D. Almendras dan Acting Panglima Angkatan Bersenjata Vice Admiral Caesar C. Taccad.

Dalam pertemuan tiga negara menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Salah satunya adalah kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di wilayah perairan laut Sulu untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional termasuk aksi pembajakan. Selain poin tersebut, terdapat tiga poin lainnya yang disepakati yakni Pertama, meningkatkan koordinasi pemberian bantuan cepat bagi warga dan kapal yang berada dalam keadaan bahaya, Kedua, meningkatkan kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelijen, serta memperkuat dan memastikan efektivitas kerja sama dalam keadaan darurat dan ancaman keamanan, Ketiga, membentuk hotline komunikasi antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi seandainya ditemui keadaan darurat dan ancaman keamanan. Kemudian pertemuan Trilateral dilanjutkan dengan Pertemuan Para Menteri Pertahanan Ke-3 Negara di Denpasar, Bali, pada tanggal 2 Agustus 2016. "Pertemuan Trilateral Para Menteri Pertahanan tersebut sepakat untuk mengembangkan lebih luas mengenai SOP (Standard Operating Procedures) pada Trilateral Maritim Patrol, latihan bersama ketiga negara, Sharing informasi, pemasangan alat automatic identification system (AIS) pada semua kapal yang melintasi melalui transit koridor, dan penetapan pewira penghubung (L.O).

Kerjasama Penanganan Malphilindo di Perairan Laut Sulu

Kajahatan transnasional yang terjadi di Laut Sulu dilakukan oleh Abu Sayyaf hal ini merupakan mengganggu stabilitas keamanan perdagangan antara ke tiga negara tersebut. Maka dari itu negara Indonesia-Malaysia dan Filipina melakukan beberapa penanganan untuk mengamankan kejahatan yang dilakukan oleh Abu Sayyaaf di perairan Laut Sulu. Berikut adalah beberapa poin kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia-Filipina

Patroli gabungan di Laut

Patkor Philindo (Phlipina dan Indonesia)

Perompakan kapal-kapal yang melewati perbatasan Indonesia-Filipina yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf Grup (ASG) akan terus dilakukan karena selain sebagai upaya pengumpulan dana dengan meminta tebusan kepada negara-negara asing apabila kelompok Abu Sayyaf tersebut melakukan penyanderaan dan pemenggalan terhadap warga negaranya (Anak Buah Kapal-ABK), wisatawan, pekerja asing, dll). Bila permintaan mereka tidak terpenuhi, juga sebagai upaya menekan pemerintah Filipina dan dunia internasional bahwa keberadaan kelompok

Abu Sayyaf perlu diperhitungkan untuk mendirikan negara Islam di Kepulauan Sulu. Dengan adanya perompakan dan penyanderaan tersebut maka sangat mengganggu keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang melewati perbatasan ketiga negara serta mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Dalam mengatasi masalah perompakan dan penyanderaan di perairan Sulu terutama perompakan dan penyanderaan terhadap kapal dan ABK berbendera Indonesia maka diperlukan kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang melibatkan militer kedua negara. Beberapa kerjasama yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dalam penanggulangan perompakan antara Indonesia-Filipina adalah Patroli Terkoordinasi Filipina-Indonesia (Patkor Philindo) yang dilaksanakan oleh TNI AL dan *Republic Philippine Navy/RPN* di perairan perbatasan laut kedua negara yang bertujuan untuk mengamankan perbatasan laut masing-masing negara.

Kerjasama Patroli Terkoordinasi antara Indonesia-Filipina (Philindo) yang dilaksanakan setiap tahun oleh TNI AL dengan *Republic Philippine Navy* (RPN) mampu menjaga hubungan baik antara kedua negara. Perairan perbatasan Indonesia-Filipina-Malaysia khususnya di sekitar perairan Kepulauan Sulu masih rawan terhadap ancaman perompakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf karena masih ada faktor keterbatasan yaitu.

- a. Alokasi kekuatan yang dilibatkan dalam pengamanan perbatasan Indonesia-Filipina bukan berdasarkan seberapa besar jumlah personelnya, namun berdasarkan alokasi kapal perang (KRI) yang dihadapkan dengan panjang perairan perbatasan Indonesia-Filipina.
- b. Area Operasi yang dilaksanakan dalam Patkor Philindo saat ini sekitar 120 Nm (hanya 1/5 dari sekitar 600 Nm panjang perairan perbatasan kedua negara) belum meng-cover seluruh perairan perbatasan Indonesia-Filipina.
- c. *Standard Operating Procedure-SOP* sangat dibutuhkan bagi unsur pelaksana di lapangan, karena sebagai panduan dalam melaksanakan Patkor di perairan perbatasan Indonesia-Filipina.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi perompakan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu tidak bisa hanya diatasi secara bilateral antara Indonesia dan Filipina saja, akan tetapi harus dilaksanakan secara bersama secara Trilateral karena lokasi basis perompak yaitu Abu Sayyaf Group berada di sekitar perbatasan Filipina-Malaysia-Indonesia.

Patroli Indomalphi

Guna menjaga stabilitas kawasan Laut Sulu maka perlu menghadirkan kekuatan Angkatan Laut tiga negara yaitu TNI AL-Tentera Laut Diraja Malaysia dan Republik Philippine Navy untuk melaksanakan Patkor Indomalphi yang didukung kekuatan Angkatan Udara dalam mengatasi perompakan di perairan Sulu yang merupakan basis kelompok Abu Sayyaf dan berada di sekitar perairan perbatasan tiga negara tersebut.

Tiga menteri pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Pertahanan Filipina Delvin N Lorenzana meresmikan kegiatan Patroli Maritim Terkoordinasi Trilateral atau "*Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*". Kegiatan *Trilateral Maritime*

Patrol Indomalphi ini digagas dan dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam rangka menghadapi tantangan keamanan terkait dengan perairan perbatasan negara saat ini. Peresmian dilakukan di atas kapal TNI Angkatan Laut KRI dr. Suharso-990 yang ditandai dengan penekanan tombol sirine, demonstrasi Indomalphi Quick Response, Sailing Pass and Flying Pass, di Tarakan, Kalimantan Utara. Acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh panglima Angkatan Bersenjata masing-masing negara. Selain itu turut hadir Menteri Senior Dr. Maliki bin Osman atas nama Menhan Singapura dan Wamenhan Brunei Darussalam FADM Dato Seri Abdul Aziz bin Haji Moh Tamit, keduanya sebagai observer.

Patroli terkoordinasi tersebut merupakan langkah konkret yang dilakukan ketiga negara, namun tetap dalam semangat dan sentralitas ASEAN, untuk menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di kawasan maritim.

Patroli udara yaitu Trilateral Air Patrols (TAP)

Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam mengamankan laut Sulu tidak hanya dilakukan dalam patroli maritim namun dilakukan dalam patroli udara juga. Pemerintah Indonesia, Malaysia, Filipina meluncurkan komponen patroli udara trilateral di Laut Sulu, hal ini menyusul adanya patroli maritim yang telah mereka laksanakan. Pada tanggal 13 Oktober 2017 ketiga negara secara resmi mengumumkan pembentukan *Trilateral Air Patrols (TAP)* yang merupakan komponen kedua dari *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)* yang diadakan di *Air Force Base, Subang Malaysia* dan dihadiri oleh menteri pertahanan ketiga negara tersebut. Pembentukan ini merupakan hasil akhir dari dua tahun perundingan menteri pertahanan masing-masing negara demi mewujudkan kebijakan yang tepat dan win-win solution untuk merespon gangguan keamanan di Laut Sulu.

Sistem kerja TAP yang pertama adalah penerbangan bulanan dengan masing-masing negara peserta bergiliran memberikan kontribusi pesawat terbang. Malaysia akan memulai patroli bersama dengan penerbangan Pada bulan November kemudian diikuti oleh Filipina pada bulan Desember dan Indonesia pada bulan Januari 2018.

Malaysia mengoperasikan sepasang Beechcraft B200T Super King Airs yang dipasang untuk patroli maritim. Sedangkan Indonesia memiliki delapan CASA/IPTN CN-235s dalam patroli maritim dan pesawat pengintai maritim. Sementara Filipina yang tidak memiliki pesawat khusus, ketiga negara kemungkinan akan menggunakan pesawat angkut seperti pesawat terbang Lockheed Martin C-130 Hercules untuk menyambungkan celah di pesawat maritim khusus di masing-masing persediaan untuk melaksanakan patroli udara.

Tujuan TAP adalah untuk melakukan patroli udara di perairan teritorial maritim di tiga negara dan memberikan dukungan operasional kepada unit maritim angkatan laut. TAP adalah salah satu inisiatif untuk memperkuat keamanan dan kesiapan ruang udara dan pengawasan maritim. Patroli tersebut juga bertujuan untuk mengintensifkan keamanan di perairan timur Sabah melalui pelaksanaan patroli udara dengan tiga negara untuk memperkuat keamanan negara melalui hubungan diplomatik antara Malaysia, Indonesia, Filipina. Implementasi TAP mengikuti peluncuran TMP

(*Trilateral Maritim Patrols*) untuk memerangi kekerasan. TMP bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok militan, termasuk negara Islam, tidak akan melakukan operasi di Laut Sulu terhadap tiga negara dan untuk memerangi pembajakan dan mencegah penculikan dan bersenjata.

Pembuatan Maritime Command Center

Peresmian *Maritime Command Center* (MCC) ditandai dengan penandatanganan prasasti bersama oleh Panglima Angkatan Berenjata dari tiga negara yakni Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jenderal Tan Sri Dato' Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor dan Chief of Staff, Armed Forces of Philippines General Eduardi M Ano AFP bertempat di Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia. Pendirian MCC merupakan upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menindaklanjuti Deklarasi Bersama di Yogyakarta, guna mewujudkan keamanan di wilayah perairan Sulu dan sekitarnya sebagai solidaritas sesama Negara anggota ASEAN. Pendirian Maritime Command Center yakni terdiri di MCC Tarakan Indonesia, MCC di Tawao Malaysia dan MCC di Bungao Filipina merupakan pusat sharing informasi dan intelijen yang menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*. Penetapan MCC di ketiga negara diharapkan akan mampu meredam dan dapat meminimalisir insiden yang mungkin terjadi di wilayah perairan dan menjadi perhatian bersama ketiga negara.

Kerjasama pencegahan pemerintah Maphilindo di perairan Sulu

Melalui kerjasama perjanjian pertukaran informasi intelejen

Pencegahan pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam perompakan di laut Sulu dengan menyepakati perjanjian pertukaran informasi dan pembentukan pertukaran prosedur komunikasi atau *the agreement on information exchange and establishment of communication procedures*. Pembentukan perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk menguatkan kemandirian lintas batas negara yang melibatkan daerah perbatasan terutama karena ketiganya memiliki *tri-border sea areas* atau perbatasan langsung di area laut. Hal ini seiring dengan perkembangan lintas batas negara yang melibatkan daerah perbatasan terutama laut sebagai jalur utama kegiatan kejahatan transnasional.

Hadirnya kerjasama ketiga negara digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama lebih lanjut dan memperkenalkan sistem untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan prosedur komunikasi antar negara anggota serta untuk membentuk kerangka kerja yang kemudian dapat mengatasi insiden keamanan di perbatasan dan kegiatan ilegal apapun yang terjadi di wilayah ketiga negara itu pula.

Perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing pihak untuk membangun jaringan komunikasi, berbagai informasi, dan menginformasikan jika adanya penangkapan nasional dari pihak lain, dan membentuk komite bersama untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional. Kesepakatan tersebut mengharuskan pihak-pihak untuk berbagi daftar penumpang, memberikan akses ke bank sidik jari masing-masing, saling berkonsultasi mengenai daftar pengabaian visa dari ketiga warga negara, membagikan daftar hitam di kantor penerbitan visa, memperkuat kontrol perbatasan melalui penetapan titik masuk dan keluar dan jalur laut. Sehingga

kemudian komunikasi langsung yang formal antara ketiga negara dapat memberikan respon yang cepat dan kemudian meningkatkan koordinasi antara mereka.

Melakukan Latihan Militer Bersama

Guna menjaga keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya, yang menjadi tempat rawan penyanderaan oleh kelompok milisi Abu Sayyab, Menteri Pertahanan (Menhan) dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah sepakat memasukkan klausul latihan bersama, hotline communication, dan automatic identification system dalam Framework of Agreement (FOA) antar ketiga negara. Indonesia, Malaysia dan Filipina sepakat untuk memulai pelatihan militer bersama dalam mengamankan Laut Sulu dari pembajakan. Pelatihan militer berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia, Pulau Tawao Malaysia dan Pulau Bangao Filipina. Dalam latihan militer bersama ketiga negara tersebut mengirimkan beberapa armada angkatan laut dan angkatan udara.

Hasil Kerjasama MAPHILINDO

Kerjasama yang diinisiasi karena tingginya ancaman kejahatan maritim di Laut Sulu ini yang dapat berpengaruh terhadap hubungan perdagangan Negara sekitar wilayah ini akhirnya membawa keberhasilan dalam menanggulangi tingginya ancaman kejahatan maritim di wilayah ini, karena pada awal tahun 2018 angka kejahatan maritim di wilayah ini turun drastis. Sesuai yang diterbitkan ReCAAP, *January-December Annual Piracy and Armed Robbery Ships in Asia 2017*, menyebutkan sepanjang tahun 2017 angka kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulu ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, pada akhir 2017 dilaporkan 3 kasus perompakan dan penculikan di wilayah perairan Sulu ini. Salah satunya adalah pembajakan kapal berbendera Vietnam pada 19 Februari 2017 dan setelah itu menurut laporan ReCAAP tidak ada perompakan dan penculikan di wilayah perairan ini hingga pertengahan tahun 2018⁴⁶. Sesuai dengan laporan ini membuktikan bahwa kerjasama ini menghasilkan hasil yang positif dan efektif.

Kesimpulan

Abu Sayyaf adalah suatu gerakan atau kelompok yang bersifat radikal dalam gerakannya melakukan aksi-aksi pengeboman, penculikan dan pengeksekusian terhadap sandera dan gerakan tersebut telah mengarah ke taraf terorisme. Dengan adanya kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Abu Sayyaf tersebut. Maka pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan beberapa penanganan terhadap perairan laut Sulu. Dalam penanganan tersebut terdapat beberapa yaitu: Melakukan patroli gabungan, pembuatan *Maritime Command Center* serta melakukan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui kerjasama perjanjian pertukaran informasi intelejen, melakukan latihan militer bersama. Kerjasama ini memberikan dampak positif terhadap wilayah sekitar perairan Laut Sulu dan juga bagi kelancaran proses perdagangan yang dilakukan Negara-negara di wilayah

Daftar Pustaka

Buku

Makmur Keliat,. (2009) "*Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*". Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kelsen Hans, (1997) *Collective Security under Internasional Law*, New Jersey: Prentice Hall Inc

Media Online

Indonesia-Filipina-Malaysia lakukan pengamanan berlapi di Laut Sulu mengutip dari <https://m.antaraneews.com/berita/601409/indonesia-filipina-malaysia-lakukan-pengamanan-berlapis-di-laut-sulu.html>. Diakses pada 13 Desember 2016.

Indonesia, Malaysia dan Filipina operasionalkan kerjasama keamanan maritim mengutip dari <http://poskotanews.com/2016/07/15/indonesia,malaysia,filipina-kerjasama-keamanan-maritim> diakses pada 15 Juli 2016

Malaysia-Indonesia and Philipines target isis in trilateral air patrols mengutip dari <http://www.defensenews.com/naval/2017/10/13/malaysia-indonesia-and-philipines-target-isis-in-trilateral-air-patrols> diakses pada 13 Oktober 2017

Securing the Sulu-Sulawesi seas from maritime :a Troublesome cooperation? www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/articleview/347/html diakses pada 3 Oktober 2014

Sejarah terbentuknya keganasan kelompok abu sayyaf mengutip dari <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-terbentuknya-keganasan-kelompok-abu-sayyaf-splitnews-2.html>

Sejarah maritim dunia mengutip dari [www.maritimtours.com/sejarah-maritim - dunia.html](http://www.maritimtours.com/sejarah-maritim-dunia.html) diakses pada

Tiga menhan resmikan patroli maritim indomalphi mengutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/19/18594751/tiga.menhan.resmikan.patroli.maritim.indomalphi>.diakses pada 12 November 2017

The Global Economy and the sulu zone connection komoditi and culture mengutip dari www.eacrh.net/ojs/index.php/crossroads/article/view/12/vol3_warren_html diakses pada 10 November 2011

Transnational Organized Crime diambil dari <http://tncc.co.id/id/home/about/> diakses pada tanggal 4 februari 2013